

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Secara garis besar, pembangunan adalah suatu proses upaya sistematis yang berkelanjutan untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memberikan berbagai pilihan yang sah demi mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat. Dengan kata lain, proses pembangunan adalah proses humanisasi. Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka menunaikan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan meliputi berbagai aspek kehidupan nasional seperti aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Aspek tersebut penting dalam meningkatkan kemampuan nasional untuk memperoleh kehidupan yang terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap, dan berkesinambungan sama seperti negara-negara maju lainnya (Suparmoko 2020).

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat tentu sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan yang dibahas ialah pembangunan mengenai ekonomi dan berbentuk fisik yaitu pembangunan kewilayahan yang ada di sekitar masyarakat. Jika terdapat regulasi atau peraturan yang memihaknya kepada masyarakat secara luas, dengan begitu mampu mempermudah dan juga menjadi lebih kondusif bagi seluruh kalangan usaha seperti pengusaha besar pengusaha dari yang kecil maupun menengah karena

dengan itu dapat cepat berkembang ekonominya. Namun sebaliknya jika peraturan hanya berpihak kepada beberapa pihak tentu akan terhambat pembangunan ekonominya (Maryani and Nainggolan 2019). Apabila pembangunan dalam suatu daerah atau daerah yang mengalami hambatan dan pembangunan tidak mengalami kemajuan pesat yang disebabkan oleh faktor manusia di suatu daerah atau daerah yang bersangkutan, oleh karena itu upaya dalam pemberdayaan masyarakat hendaknya dipimpin oleh pemerintah dengan bekerjasama bersama pihak-pihak terkait yang berkompeten guna melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk wilayah atau wilayah yang terkena dampak. (Mahsyar 2011).

Secara umum, pada suatu wilayah atau wilayah yang masyarakatnya mempunyai kekuasaan yang lebih kecil, kemajuan pembangunan akan lambat dan implikasi kesejahteraannya akan rendah. Namun apabila penduduk suatu wilayah atau wilayah mampu atau mandiri, maka pembangunan yang pesat umumnya dikaitkan dan berimplikasi pada tingginya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Mengenai upaya pembangunan nasional sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional), pemerintah daerah memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan berbagai inovasi. Inilah yang mendorong lahirnya Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sebagai bentuk konkret dari

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. (Refida, Purba, and Kusumawati 2021)

Pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan juga merupakan bagian integral dari fungsi pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2015, Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung meluncurkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Pelaksanaan program ini diatur oleh Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015. Konsepsi program ini muncul karena pemerintah percaya bahwa perubahan yang diinginkan dapat terwujud melalui partisipasi aktif langsung dari masyarakat, yang juga disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Di Kota Bandung, PIPPK ini khusus diadakan dan dilaksanakan SKPD kecamatan yang ada di seluruh Kota Bandung. Dalam program ini juga terdapat beberapa prinsip, diantaranya yaitu; efektif-efisien, demokratis-partisipatif, terbuka, transparan serta akuntabel, ekonomis. Karakteristik dari implementasi program PIPPK membutuhkan adanya peran atau partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan di daerahnya masing-masing menjadi ke-khasan dalam pelaksanaan Program Inovasi dan Pemberdayaan Pembangunan Daerah (PIPPK). Pembangunan PIPPK tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. (Gustensi 2018)

Namun PIPPK menghadapi beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, salah satu dari tantangan tersebut ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) masyarakat di setiap daerah dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Program ini, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan, dan pelaporan. Sebab, kedudukan SDM sangat menentukan keberlangsungan PIPPK. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Wali Kota Bandung tekankan pada pelatihan atau pengawasan teknis kepada seluruh aktivis PIPPK dalam upaya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM). Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan mempercepat Tujuan utama PIPPK adalah membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam rangka pembangunan daerah harus tercapai. Di daerah dilaksanakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah (PIPPK) yang disebut juga 100 juta per RW. Pembiayaan RW bukan satu-satunya tujuan PIPPK. Dana tersebut juga disalurkan ke Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Lihat saja PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Untuk mempunyai wilayah kerja tertentu, kecamatan merupakan bagian kepanjangan tangan pemerintah kota/kabupaten yang melaksanakan teknis pelaksanaan dan pelayanan daerah. Kecamatan memegang peranan penting di wilayah ini. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, sehingga terjadi pergeseran jabatan aparatur pemerintah daerah dari yang semula bersifat administratif menjadi wilayah kerja dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan peluang kepada daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam bidang pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat lokal.

Dari penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Cibiru dapat

dilakukan melalui 5 indikator untuk mengetahui serta menganalisis hasil efektivitas tersebut yaitu dengan; 1) Mengetahui keberhasilan program yaitu dengan mengetahui kelancaran dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 2) Keberhasilan sasaran yaitu dengan mengetahui ketepatan antara sasaran peserta dengan tujuan program, target anggaran sesuai dengan realisasi, aturan dan pelaksanaan program sesuai dengan target dalam perencanaan. 3) Kepuasan terhadap program yaitu dengan mengetahui keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan dari penerima program tersebut. 4) Tingkat input dan output, para penyelenggara program harus siaga dengan tanggapan, kritik/saran, atau laporan dari masyarakat terkait program yang dijalankannya dengan merespon dan memproses segera agar laporan, kritik/saran dapat segera di perbaiki atau dirubah. 5) Pencapaian tujuan menyeluruh, mengetahui kesiapan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan menyeluruh dari program PIPPK ini.

Pada saat peneliti melakukan wawancara dilakukan peneliti pada tanggal 14 september 2023 kepada bapak Cecep Anwar Hidayat, SE selaku Sub Bagian Program dan Keuangan, Sekretariat Kec. Cibiru. Mengatakan bahwa adanya permasalahan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini yakni masyarakat masih bergantung terhadap dana perangsang yang ditentukan dalam kegiatan pembangunan kewilayahan sehingga jika PIPPK sudah ditiadakan maka masyarakat pun tidak akan aktif berperan dalam pembangunan kewilayahan ini (Alia and R 2019). PIPPK dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Bandung karena kepentingannya di wilayah tersebut.

Di setiap kelurahan Kecamatan Cibiru, lembaga kemasyarakatan senior melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah. Sesuai dengan perjanjian kinerja di tahun 2021 dan 2022, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Cibiru Tahun 2021-2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Pemerdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah	Presentase pendirian komunitas tingkat tinggi	80,5	82

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Tahun 2021 dan 2022

Dapat dilihat diatas bahwa terdapat perjanjian kinerja sebelum pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini, baik di tahun 2021 maupun 2022. Tentu didalam perencanaan tersebut, terdapat target yang akan diusahakan agar tercapai. Dapat dilihat juga bahwa target Program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah adalah sebesar 80.5 % di tahun 2021 dan 82 % di tahun 2022. Salah satunya ialah sasaran strategis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kecamatan yang memiliki indikator kinerja berdasarkan LKU (Lembaga Kemasyarakatan Unggul). Program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah pada pelaksanaannya akan dilakukan oleh Lembaga kemasyarakatan kelurahan yang memenuhi kriteria atau disebut Lembaga Kemasyarakatan Unggul (LKU). Berikut ini jumlah Lembaga

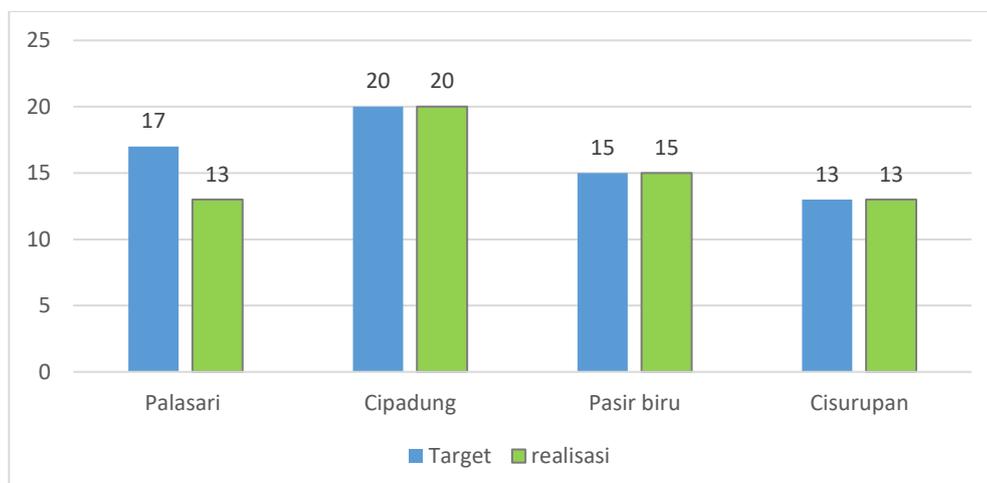
kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan LKU di Kecamatan Cibiru tahun 2021 dan 2022:

**Tabel 1.2**  
**Nilai Unsur Presentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul**  
**Kecamatan Cibiru Tahun 2021-2022**

No	Kelurahan	Nilai Unsur Presentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul			
		Jumlah LKK		Jumlah LKU	
		2021	2022	2021	2022
1	Palasari	17	14	13	16
2	Cipadung	20	16	20	20
3	Pasir Biru	15	12	15	10
4	Cisurupan	13	11	13	13
Jumlah		65	53	61	59
Kinerja presentase lembaga kemasyarakatan unggul		Tahun 2021 sebesar 93,85%			
		Tahun 2022 sebesar 91%			

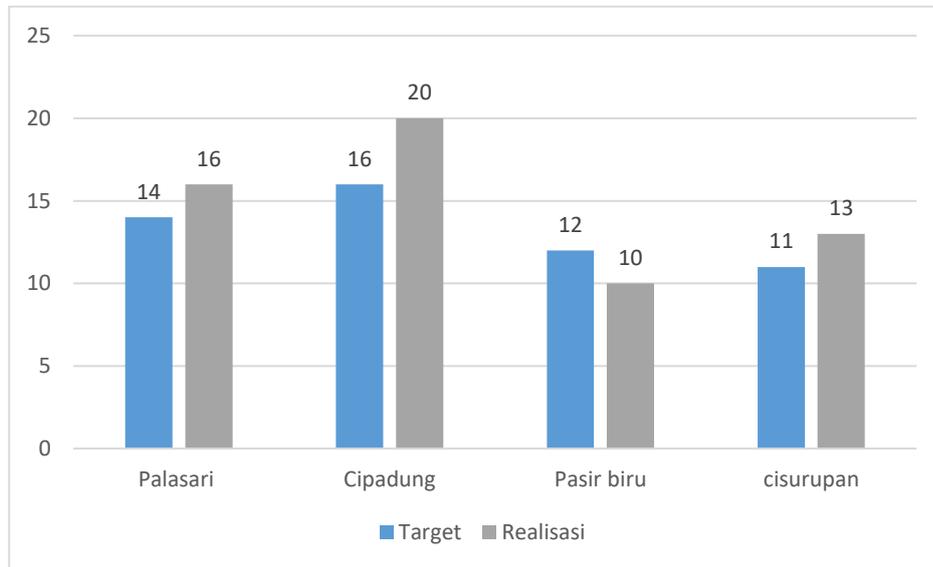
Sumber : LKIP Kecamatan Cibiru Tahun 2021 dan 2022

**Gambar 1.1**  
**Nilai Unsur Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan Cibiru**  
**Tahun 2021**



Sumber : LKIP Kecamatan Cibiru Tahun 2021

**Gambar 1.2**  
**Nilai Unsur Presentase Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan**  
**Tahun 2022**



Sumber : LKIP Kecamatan Cibiru Tahun 2022

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat data terendah dan tidak mencapai target yaitu pada tahun 2021 di kelurahan Palasari dengan target Lemabaga Kemasyarakatannya 17 namun yang unggulnya hanya mencapai 13 dan juga pada tahun 2022 di Kelurahan Pasirbiru target Lembaga Kemasayarakatannya 12 namun yang unggul hanya mencapai 10. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi masalah turunnya Lembaga Kemasyarakatan Unggul pada dua kelurahan di dua tahun tersebut. Lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi kriteria unggul tetap menjalankan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya Janji Walikota/RPJMD (PIPPK) akan tetapi tidak mencapai persentase ketentuan formulasi yang terdapat dalam IKU Kecamatan. (Christina et al. 2021)

Selanjutnya, dari penarikan kesimpulan adanya permasalahan diatas bahwa masyarakat kecamatan Cibiru belum optimal untuk berperan aktif dalam

pembangunan wilayah di sekitarnya. Lemahnya partisipasi masyarakat disebabkan rendahnya pengurus RW dan LKK dalam memahami kriteria Lembaga Kemasyarakatan Unggul sehingga perencanaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Dan khususnya pada tahun 2020/2021 ketika adanya PSBB atau pandemi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang bahwa telah diuraikan di atas, dengan itu penulis dapat menguraikan identifikasi masalah ini, diantaranya yaitu:

1. Masyarakat masih bergantung terhadap dana perangsang yang ditentukan dalam kegiatan pembangunan kewilayahan sehingga jika PIPPK sudah ditiadakan maka masyarakat pun tidak akan aktif berperan dalam pembangunan kewilayahan ini.
2. Rendahnya LKU pada tahun 2021 di kelurahan Palasari dan tahun 2022 di kelurahan Pasirbiru. Kedua kelurahan tersebut LKU nya tidak sesuai dengan target.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat Cibiru terhadap pembangunan kewilayahan yang berada disekitarnya

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pembahasan yang sudah diuraikaikan diatas, maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung?
2. Bagaimana keberhasilan sasaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung?
3. Bagaimana kepuasan terhadap Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung?
4. Bagaimana tingkat input dan output Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung?
5. Bagaimana pencapaian tujuan menyeluruh Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui keberhasilan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung.
2. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepuasan terhadap Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung.
4. Untuk mengetahui tingkat input dan output Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung

5. Untuk mengetahui pencapaian tujuan menyeluruh Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di kecamatan Cibiru kota Bandung.

### **1.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, terutama kaitannya di seluruh kecamatan di Jawa Barat dalam program inovasi pembangunan dan pemberdayaan daerah. Selain itu juga terlihat betapa efektifnya pelaksanaan Program Pembangunan, Inovasi dan Pemberdayaan Daerah (PIPPK) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibiru Kota Bandung di seluruh kecamatan se-Jawa Barat dalam pembangunan daerah dan program inovasi pemberdayaan. Selain itu, terlihat bagaimana implementasi Program Pembangunan, Inovasi dan Pemberdayaan Daerah (PIPPK) efektif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Kami berharap peneliti mendapatkan ilmu dan pemahaman baru dari hasil penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai profesionalisme aparatur pemerintah di Kecamatan Cibiru dalam melaksanakan Program Inovasi dan Pemberdayaan Pembangunan Daerah (PIPPK).

## 2. Manfaat Praktis

Salah satu manfaat untuk peneliti yaitu sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu juga terdapat manfaat lain bagi peneliti sendiri yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat mengembangkan kemampuan peneliti dalam hal keterampilan dan kemampuan analisis serta pemahaman mengenai efektivitas kebijakan.

### a. Untuk Instansi Terkait

Dengan penelitian ini diharapkan bagi instansi terkait dapat memecahkan masalah serta dapat menjadi inspirasi sebagai bahan evaluasi kebijakan program tersebut untuk kedepannya.

### b. Untuk Masyarakat

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar Cibiru untuk menambah informasi terkait Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Suatu program berupa inovasi-inovasi didalamnya harus berdasarkan kriteria yang ada. Dengan kata lain, harus memenuhi tujuan dari program tersebut. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dijalankan di Kantor Kecamatan Cibiru tentu tidak terlepas dari adanya permasalahan ataupun hambatan selama berjalannya program tersebut. PIPPK di Kecamatan Cibiru memiliki beberapa permasalahan yang tentu harus

diselesaikan secara maksimal sehingga dapat mencapai program yang efektif dan efisien. Dengan demikian, untuk mencapai kata efektif pada suatu program diperlukan langkah-langkah tertentu untuk mencapainya.

Dalam mengukur tingkat efektivitas suatu program yang berdasarkan hasil dari implementasi suatu kebijakan publik. Khususnya, untuk Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Cibiru terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan dalam efektivitas program menurut Campbel J. P dalam Mutiarin dan Zaenudin (2014: 96-97):

1. Keberhasilan Program, dengan mengetahui kelancaran selama proses pelaksanaan program kerja yang sesuai dengan target yang telah ditentukan
2. Keberhasilan sasaran, dengan mengetahui ketepatan antara tujuan program dengan target sasaran
3. Kepuasan terhadap program, dengan mengetahui keberhasilan program untuk memenuhi kebutuhan dari penerima program tersebut
4. Tingkat input dan output, para penyelenggara program harus siaga dengan laporan dari masyarakat terkait program yang dijalankannya dengan merespon dan memproses segera agar laporan, kritik/saran dapat segera di perbaiki atau dirubah
5. Pencapaian tujuan menyeluruh, mengetahui kesiapan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan menyeluruh dari program PIPPK ini.

**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pemikiran**



### 1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Dibawah ini ialah tabel dari beberapa Penelitian Terdahulu yang berhubungan dengan judul yang akan dilakukan penelitian tentang Efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cibiru.

**Tabel 1.3**  
**Hasil Penelitian**

No	Nama Penulis	Judul penelitian	Keterkaitan	Kebaharuan (Novelty)
1	Dian Noviyanti, Andrea Emma Pravitasari, Sahara (2020) Bogor, Jawa Barat.	Analisis Perkembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk Arahan Pembangunan Berbasis Wilayah Pembangunan.	Keterkaitan dengan penelitian ini adalah pembangunan yang berkonsep kewilayahan dapat menjadi solusi dari penanggulangan ketidaksetaraan pembangunan, khususnya yang berada di Provinsi Jawa Barat.	Penelitian ini membahas terkait ketimpangan level ekonomi di wilayah pusat dengan daerah menjadi faktor terhambatnya perkembangan pembangunan wilayah sehingga diperlukan strategi untuk pemerataan pembangunan yang tidak menyantumkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya. Sedangkan peneliti berfokus pada

				<p>pelaksanaan pembangunan kewilayahan yang sudah memiliki solusi berupa suatu program yang diadakan di berbagai daerah sebagai suatu penanggulangan ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat.</p>
2	<p>Yan Mahameru (2021) Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur</p>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembangunan Infrastruktur Daerah</p>	<p>Keterkaitan dengan penelitian ini yaitu bahwa pembangunan akan selalu berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dikarenakan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur menjadi hal yang penting agar</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang diukur melalui tingkat perkembangan ekonominya dan peran masyarakat dalam membantu untuk mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Sedangkan peneliti berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam</p>

			adanya kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri.	pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cibiru.
3	Irsyad Haniif Isakh, Jessica Claudia Rossa, Kaysea, Safadristi Narendragha rini, Khairunnisa Sultan Putri (2020) Universitas Padjajaran, Bandung.	Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay.	Keterkaitan penelitian ini ialah masyarakat menjadi pihak yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini.	Penelitian ini membahas terkait kerjasama berbagai pihak seperti para stakeholders dan juga masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini, khususnya di Kecamatan Ciparay yang melibatkan RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Sedangkan peneliti berfokus terhadap keberhasilan program PIPPK yang dilihat dari aspek pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Cibiru.
4	Atalia Praratya (2017)	Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan	Keterkaitan penelitian ini yaitu pelaksana teknis dalam	Penelitian ini membahas terkait adanya pengaruh gaya kepemimpinan

	Universitas Pasundan, Bandung.	Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung	kegiatan PIPPK memang dituntut untuk dapat professional dalam menjalani programnya yang sesuai dengan 8 prinsip PIPPK itu sendiri	(Lurah) terhadap kinerja dari kegiatan PIPPK khususnya terhadap kinerja para karyawannya yang ada di Kota Bandung. Sedangkan peneliti hanya berfokus terhadap kinerja PIPPK yang mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat itupun hanya di lingkup Kecamatan Cibiru saja .
--	--------------------------------	---	---	---

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Perbedaan mendasar dari keempat penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan ialah bahwa penelitian terdahulu kebanyakan membahas secara global terkait daripada adanya perkembangan kewilayahan yang terjadi serta akibat dari terhambatnya pembangunan dikarenakan ekonominya atau bahkan terkait kinerja PIPPK yang dilihat dari aspek lain seperti tingkat keberhasilan kolaborasi nya atau mungkin penyebab kurang optimal program karena gaya kepemimpinan sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap pengaruh dari berjalannya PIPPK ini dengan pemberdaayaan masyarakat yang ada di Kecamatan Cibiru sehingga yang diukur ialah efektivitas dari PIPPK ini yang diteliti melalui beberapa data yang didapatkan langsung dari Kecamatan Cibiru.

## 1.8 Proposisi

Dari uraian penjelasan kerangka pemikiran diatas, maka proposisi penelitian ini adalah Efektivitas Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan dalam meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam pelaksanaannya akan menjadi lebih baik dan efektif, apabila menggunakan pengukuran konsep keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

